

**ANALISA PENGATURAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DITINJAU
BERDASARKAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT**

PENULISAN HUKUM

Oleh:

**LANANG ZUSSAUKAH
10311106**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2018**

**ANALISA PENGATURAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DITINJAU
BERDASARKAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT**

Diajukan Oleh:

LANANG ZUSSAUKAH

201310110311106

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

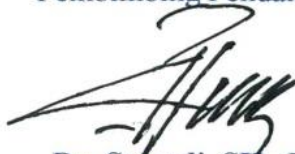
Pada, Sabtu 31 Maret 2018

Pembimbing Utama,



Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



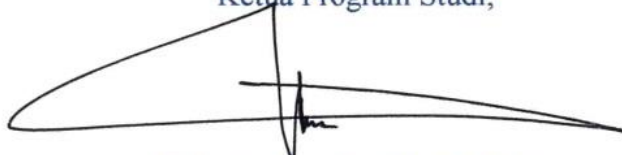
Dr. Sulardi, SH., M.Si.

Dekan,



Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Kata Pengantar

Puji syukur saya ucapkan Kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Dan salam Kepada Rasul Allah Muhammad *sallahu alaihi wasallam*.

Karya ini tentu tidak akan dapat saya selesaikan kecuali atas kehendak-Nya.

Kemudian untuk Ibu-Bapak tentu saya ucapkan terimakasih atau berdosalah saya jika tidak melakukannya.

Ucapan terimakasih saya sampaikan juga kepada :

1. Bapak Dr. Surya Anoraga., M.Hum sebagai Pembibing I dan

2. Bapak Dr. Sulardi., SH, M.Si sebagai Pembibing II.

Karena, karya ini tidak mungkin dapat saya selesaikan jika tanpa bimbingan dari beliau berdua yang dilakukan dengan penuh kesungguhan juga kesabaran.

Kemudian saya ucapkan juga terimakasih pada orang-orang sekeliling yang memberi dukungan dengan berbagai bentuk.

Kemudian, perlu kiranya saya sampaikan bahwa hal tersulit dalam menyelesaikan karya ini adalah mempertahankan obyektifitas dan netralitas dalam membendung emosi personal. Mengingat terdapat kesan pribadi saya dalam memandang sesuatu yang berhubungan dengan partai politik.

Semula saya ingin menjadikan karya ini sebagai "gugatan nurani" atas ketersinggungan nurani dimasa lalu. Dan saya berniat hanya mengumpulkan fakta-fakta dan argumen-argumen tertentu yang merujuk sikap parsialitas. Tapi kemudian saya merasa bahwa akan cacat gelar kesarjanaan saya jika Tugas Akhir ini diselesaikan dengan ketidakjujuran intelektual dan melangkahi kaidah-kaidah dasar keilmuan.

Akhir kata, saya menyampaikan bahwa tugas akhir ini telah saya kerjakan dan dibimbing dengan sungguh-sungguhnya oleh Dosen Pembibing saya. Sehingga dinyatakan siap untuk diujikan dihadapan Majelis.

Malang, 21 Maret 2018

ttd

Lanang Zussaukah

DAFTAR ISI

Lembar Cover/Sampul Dalam.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Ungkapan Pribadi :	iv
Abstraksi	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penulisan	8
G. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Kedaulatan Rakyat	12
1. Pengertian Kedaulatan Rakyat	12
2. Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	16
a. Kedaulatan Rakyat Sebelum Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	17
b. Kedaulatan Rakyat Sesudah Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	18
3. Teori Perwakilan	19
B. Konsep Partai Politik.....	22
1. Pengertian Partai Politik	22
2. Peran dan Fungsi Partai Politik	25
3. Hak dan Kewajiban Partai Politik	27
C. Konsep Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	32
B. Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat.....	43

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran-saran	58

DAFTAR PUSTAKA	60
----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan pengaturan pemberhentian Anggota DPR dari masa Orde Baru sampai Reformasi	33
---	----



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abu Daud Busroh. 2011. *Ilmu Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- B.N. Marbun. 2011. *Kamus Politik*. Jakarta. Sinar Harapan.
- Bryan A.Garner. 2000. *Black's Law Dictionary: Seventh Edition*. Saint Paul. West Group.
- Budiono Kusumohamidjojo. *Filsafat Politik*. 2015. Jalasutra. Yogyakarta.
- C. F. Strong. 2011. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*. Bandung. Nusa Media.
- Deden Faturrohman dan Wawan Sobari. 2002. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang. Penerbit UMM Press.
- Deliar Noer. 1989. *Mohammad Hatta Suatu Biografi Politik*. Jakarta. LP3ES.
- Hotma P. Sibuea. 2014. *Ilmu Negara*. Erlangga. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Grafindo. Jakarta.
- Miriam Budiardjo. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. 2002. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung. Alumnus.
- Norm Kelly & Sefakor Ashiagbor. 2011. *Partai Politik dan Demokrasi Dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*. National Democratic Institute. Washington DC.
- Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit. Prenada Kencana Media Group.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Simon Blackburn. 2013. *Kamus Filsafat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta. Penerbit PT. Rajawali Grafindo Persada.

Jurnal/Karya Ilmiah :

M. Lutfi Chakim. 2012. *Pengaturan dan Praktik Recall Anggota DPR Dalam Dinamika Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komparasi Pemberhentian Anggota Parlemen di Negara Amerika. Australia, dan Filipina)*. Malang. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Malicia Evendia. 2012. *Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat*. Lampung. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 3. Fakultas Hukum. Universitas Lampung.

Nike K. Rumokoy. 2012. *Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Manado. Jurnal Hukum Unsrat. Vol.XX/No.1/Januari-Maret/2012. Fakultas Hukum. Universitas Sam Ratulangi.

PUSKAPOL Fisip-UI. 2015. *LAPORAN HASIL PENELITIAN PERILAKU PEMILIH PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 DI JAKARTA SELATAN*.

Stevanus E Van Setio. 2013. *Hak Recall Partai Politik Terhadap Keanggotaan DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Denpasar. Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Kementrian Dalam Negeri. 2016. *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Internet :

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri>.

Gede Pasek Dipecat Gara-gara Langgar Kode Etik, <https://nasional.tempo.co/read/545724/-gede-pasek-dipecat-gara-gara-langgar-kode-etik>

Sekjen PKB Bicara Mengenai Pemecatan Lily Wahid & Gus Choi, <https://news.detik.com/be-rita/d-2198475/sekjen-pkb-bicara-mengenai-pemecatan-lily-wahid--gus-choi>

Ini isi surat pemecatan Gede Pasek dari DPR. <https://nasional.sindonews.com/read/828206/12/ini-isi-surat-pemecatan-gede-pasek-dari-dpr13902032-76/>.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis
Permasyarakatan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis
Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006.